

### **BAB III**

## **LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI BELITANG, 1938-1996**

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan kesejahteraan penduduk pribumi terutama pada bidang perekonomian adalah dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang berguna sebagai penunjang atas kemajuan tersebut. Infrastruktur yang dimaksud ini berupa Bendungan yang fungsinya digunakan untuk memenuhi ketersediaan air pada lahan-lahan pertanian, sehingga dengan tersedianya air hal ini akan mudah sekali dalam mengembangkan sebuah pertanian yang maju. Belitang merupakan daerah yang memiliki infrastruktur besar yang sudah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Infrastruktur ini berupa Bendungan yang fungsinya sebagai penahan air yang berhulu di muara sungai, agar bisa mensuplai air secara maksimal untuk pertanian melalui sistem irigasi.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi pembangunan Bendungan di Belitang, meliputi: *pertama*, adanya kebijakan Politik Etis dari pemerintah Kolonial Belanda sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. *Kedua*, upaya dalam pemenuhan kesejahteraan bagi orang-orang transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa dalam mengatasi masalah pertanian melalui sistem irigasi yang pengairannya dipusatkan pada Bendungan itu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka uraian dalam bab ini mencakup, Politik Etis dan kebijakan pembangunan Bendungan di Hindia-Belanda, kebijakan transmigrasi di Belitang dari masa kolonial sampai masa Orde Baru, serta pembangunan Bendungan Perjaya dan perkembangannya.

## **A. Politik Etis dan Kebijakan Pembangunan Bendungan di Hindia-Belanda**

Tahun 1899 merupakan tahun kemunculan dari istilah “*Eereschuld*”, yang diartikan sebagai hutang kehormatan.<sup>1</sup> Istilah ini ditujukan untuk tanah jajahan kolonial Belanda yakni Hindia-Belanda (Indonesia Sekarang), sebagai hutang kehormatan negeri Belanda yang telah banyak mengeksploitasi tanah Hindia-Belanda melalui sistem Tanam Paksa dan semua kekayaan Belanda yang diperoleh dari tanah Hindia-Belanda.

Di negeri Belanda, Perhatiannya yang kurang terhadap tanah jajahan Hindia-Belanda, membuat hati seorang Van Deventer tergugah untuk menuliskan mengenai kemiskinan yang terus bertambah di Pulau Jawa. Dari tulisannya itu, Deventer terinspirasi dari pandangannya tentang masalah politik penghisapan yang telah dilakukan oleh penjajah terhadap penduduk pribumi. Dia beranggapan bahwa penduduk pribumi telah banyak mengalami penderitaan dari upaya pemulihan perekonomian negara Belanda yang sempat mengalami kebangkrutan. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah Belanda lebih memusatkan perhatiannya demi kemajuan kembali tanah jajahannya. Van Deventer juga merekomendasikan agar pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada penduduk jajahannya sebagai suatu imbalan atau balas budi yang telah banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah kolonial Belanda.<sup>2</sup>

Kemudian, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya mengumumkan atas penyelidikannya mengenai taraf kesejahteraan penduduk yang ada di Pulau Jawa.

---

<sup>1</sup>H. Baudet dan I. J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 6.

<sup>2</sup>Agus Susilo dan Isbandiyah, “Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Historia*, Vol. 6., No. 2. 2004, hlm. 405.

disisi lain isi dari pidato tersebut adalah *pertama*, bahwa *Netherland* memiliki kewajiban agar lebih memberikan perhatian pada tanah Hindia-Belanda. *Kedua*, *Netherland* akan meringankan sedikit beban pribumi dengan diberlakukannya Politik Etis di negara ini.<sup>3</sup>

Awal mula Politik Etis diberlakukan di Hindia-Belanda adalah berasal dari akar permasalahan tentang kemanusiaan dan mengarah pada keuntungan ekonomi. Pada abad ke-19, beberapa orang Belanda telah sadar akan keadaan penduduk pribumi, mereka mulai kasihan dan prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi yang sangat memerlukan akan perubahan hidup yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan masalah pendidikan. Kebijakan Politik Etis akan diberikan oleh bangsa Belanda untuk bangsa Indonesia yang lemah secara adil.<sup>4</sup>

Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina telah menyampaikan dalam pidatonya bahwasanya Politik Etis secara resmi akan diberlakukan di Indonesia, hal ini juga menjadi sebuah pertanda akan dimulainya zaman baru bagi bangsa Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dibuat pemerintah Belanda dan akan menjadi dasar kebijakan baru di tanah jajahan Hindia-Belanda, meliputi: perpindahan penduduk (emigrasi), pengairan (irigasi), dan pendidikan (edukasi). Untuk pelaksanaan tiga proyek tersebut maka sangat diperlukan dana. Untuk itu, sekitar 40 juta gulden hutang dari pemerintah Kolonial Belanda dialihkan menjadi hak milik pemerintah Belanda, sehingga pengeluaran dapat ditingkatkan oleh

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 407.

<sup>4</sup>Van Niel Robert, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (Bandung: Bumi Aksara, 1984), hlm. 58.

Batavia tanpa memiliki beban hutang lagi. Selanjutnya, Politik Etis mulai dilaksanakan.<sup>5</sup>

Politik Etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda, secara pasti tidak terlepas dari adanya kepentingan penjajah Belanda, yang menuntun bangsa Indonesia untuk menuju kearah kemajuan, tetapi masih tetap berada di bawah naungan Pemerintah kolonial Belanda. Untuk pelaksanaan pertama dari Politik Etis akan dimulai dari permasalahan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Pulau Jawa secara berlebihan, karena hal ini sangat mempengaruhi perkembangan selama diadakannya zaman penjajahan baru di Hindia-Belanda. Sementara itu, di daerah-daerah luar Pulau Jawa masih sangat kurang memiliki penduduk, masih jarang dihuni penduduk, dan bahkan sama sekali tidak berpenduduk. Hingga pada akhirnya akan dilaksanakan pemindahan penduduk dari daerah Pulau Jawa.

Pada tahun 1905, koloni-koloni Jawa pertama berhasil ditempatkan di daerah Sumatra Selatan, sampai pada tahun 1930. Keseluruhan jumlah koloni yang berhasil dipindahkan sebanyak 36.000 jiwa.<sup>6</sup> Di samping pemindahan penduduk, pemerintah Belanda juga membuka lahan-lahan pertanian bagi penduduk, dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan penduduk di tempat barunya. Dalam hal ini pembangunan sistem irigasi sangat diperlukan, karena sistem Irigasi ini akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sistem irigasi memiliki beberapa fungsi, antara lain: *Pertama*, untuk mensuplai air bagi tanaman yang sesuai dan

---

<sup>5</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 320.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 327.

pas dari jumlah dan waktu yang dibutuhkan. *Kedua*, untuk pendinginan pada tanah dan akar tanaman, mencegah tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh *frost*, dan air irigasi digunakan untuk menyediakan proses persemaian.<sup>7</sup>

Pada Ketentuan dan pelaksanaan pendidikan bagi penduduk pribumi yang pada awalnya hanya ditujukan bagi kaum priyayi saja, tetapi dengan semakin meningkatnya akan kebutuhan birokrasi maka banyak pula anak dari kaum priyayi bawah maupun masyarakat biasa bisa masuk dan mendaftar pada pendidikan Barat di Hindia-Belanda. Terdapat banyak sekali usaha yang telah dilaksanakan pada bidang pendidikan, dan hasil-hasilnya tentu saja selalu membuat bangga dan senang para pejabat Belanda. Para pendukung pelaksanaan Politik Etis telah setuju dengan ditingkatkannya pendidikan untuk rakyat pribumi.

Perbaikan akan pendidikan yang paling berarti yakni pada sistem untuk sekolah dasar dua kelas yang telah dibuka secara kecil-kecilan diperuntukkan bagi pribumi sejak tahun 1892-1893. Bagi golongan atas mendapatkan sekolah di kelas satu, sedangkan golongan kalangan biasa atau rakyat jelata untuk menempati di kelas dua.<sup>8</sup>

Belitang merupakan salah satu daerah hasil dari Politik Etis, karena daerah ini memiliki salah satu sarana prasarana penunjang untuk kebutuhan pertanian berupa saluran irigasi yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1938. Selain itu, penduduk Belitang mayoritas adalah penduduk pindahan dari Jawa yang sudah dikirimkan sejak tahun 1937. Wilayah ini juga terdapat sekolah pertama yang di

---

<sup>7</sup>Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 200.

<sup>8</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, hlm. 332.

bangun, tepatnya di desa Sidomulyo, dan menjadi salah satu sarana pendidikan yang dibangun untuk melengkapi tiga dasar Politik Etis tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu kebijakan Politik Etis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam membangun infrastruktur besar seperti Bendungan Komerling merupakan awal mula kemajuan penduduk pribumi di bidang perekonomian. Lemahnya ekonomi di Hindia-Belanda yang selama ini telah diperas habis-habisan oleh penajajah akhirnya sedikit demi sedikit telah terbayar kembali dengan adanya kebijakan Politik Etis. Pembangunan Bendungan ini diperuntukkan agar pertanian yang dibuka di Belitang menjadi salah satu pertanian yang maju. Untuk itu alasan Belanda menguatkan pembangunan infrastruktur besar seperti ini, karena wilayah Belitang merupakan wilayah dengan dataran rendah dan memiliki tanah cukup subur sehingga jika pertanian dikembangkan di wilayah ini maka hasilnya akan semakin meningkat.

Pembangunan Bendungan Komerling oleh pemerintah Belanda pada tahun 1938 memiliki dua model pengelolaan pengairan. (1) pengelolaannya sudah ditetapkan atas dasar kebijaksanaan pemberlakuan sistem tanam yang telah dibuat oleh pemerintah. (2) pengairannya didasarkan pada praktek-praktek yang telah ditetapkan pada proposional menurut luasnya wilayah yang diairi. Dalam hal ini tata cara pengairannya semuanya sudah termasuk dari peraturan pemerintah.

Pembangunan Bendungan diawali dengan adanya kekurangan air di daerah-daerah atau keperluan pada usaha tani rakyat yang menjadi sangat penting, sehingga penyaluran-penyaluran air menjadi suatu persoalan tersendiri bagi

---

<sup>9</sup>Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement In the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, (New York: American Geographical Society, 1945), hlm. 220.

pemerintah. Pengaturan perairan yang memuncak dalam pengaturan umum tentang air, menjadi salah satu puncak ketegangan-ketegangan pada *team kemakmuran* di lapangan. Sehingga hal ini memicu para insinyur irigasi dan pengawas pengairan untuk menggiatkan perekonomian terutama dengan membangun Bendungan-Bendungan Permanen. Selanjutnya, pembangunan ini diberlakukan untuk luaran Pulau Jawa terutama bagi tempat-tempat orang Jawa yang telah dipindahkan.<sup>10</sup>

Program Politik Etis yang sudah terlaksana di Belitang ini memberikan hasil positif bagi penduduk pribumi, apalagi setelah adanya pembangunan besar berupa Bendungan Komerling, kesejahteraan penduduk semakin bertambah, ekonomi penduduk juga semakin membaik, dan telah mengurangi angka kemiskinan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, berkat kegigihan dan keuletan orang-orang Jawa dalam mengerjakan segala pekerjaan maka pencapaian perekonomian cepat bertambah.

## **B. Kebijakan Transmigrasi di Belitang Masa Kolonial dan Masa Orde Baru**

Transmigrasi merupakan salah satu program yang diadakan di Indonesia dalam rangka untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Terutama di pulau Jawa dengan kasus kepadatan penduduk yang amat tinggi, kurangnya sumber ketenagakerjaan serta semakin meningkatnya angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah dalam berbagai cara akan berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk yakni dengan memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih sedikit penduduknya. Tidak hanya dari pulau

---

<sup>10</sup>H. Baudet dan I. J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, hlm. 307.

Jawa saja, transmigrasi juga diadakan di pulau penduduk padat lainnya seperti pulau Lombok dan pulau Bali untuk dipindahkan ke pulau lainnya. Transmigrasi di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Belanda tahun 1905 sampai dengan 2005 dan sudah menempuh perjalanan pelaksanaan yang mencapai satu abad.<sup>11</sup>

Pada masa pemerintah Belanda Transmigrasi disebut dengan istilah *kolonisatie* atau semacam hutang budi. Pada awal percobaan kolonisasi, pemerintah Belanda memberikan tugas kepada Asisten Residen, H.G. Heitjting, agar mempelajari persoalan emigrasi orang Jawa secara ekstrim dan mengajukan proposal setelahnya. Kemudian Heitjting melakukan penyelidikan di daerah terpadat di Jawa, yakni kediaman Kedu, dia mengeluarkan laporan awal pada bulan Desember 1903 tentang perjalanan melalui Sumatera Selatan, di mana dia telah mencari situs yang cocok untuk percobaan kolonisasi dengan keluarga Jawa. Pada bulan Mei 1905 Heitjting memulai persiapan pendirian Koloni Jawa di Gedongtataan dengan biaya perkiraan yang mencapai tujuh juta gulden. Heitjting menyarankan kepada pemerintah Belanda agar disetiap proyek dibangun kelompok inti yang terdiri dari 500 kepala keluarga dengan menerima jaminan hidup selama tahun pertama yang nantinya agar diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain di tahun-tahun selanjutnya.<sup>12</sup>

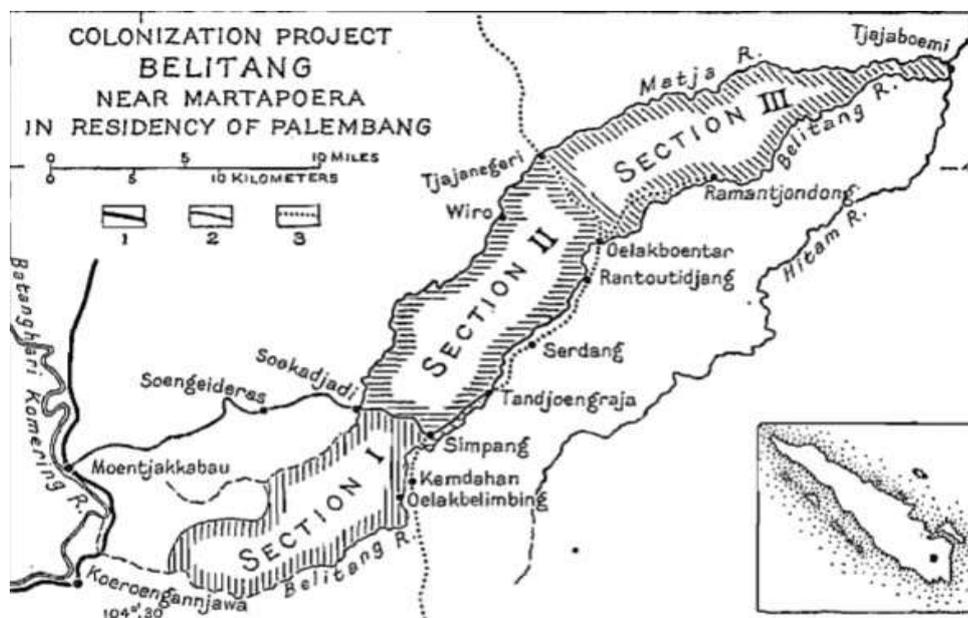
Pada tahun 1937 pemerintah Belanda mulai melakukan pemindahan penduduk untuk ditempatkan pada marga-marga yang berada di *OnderAfdeling*

---

<sup>11</sup>Nugraha Setiawan, *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 5.

<sup>12</sup>MR. C. C. J. Maassen, *De Javaansche Landbouwkolonisatie in De Buitengewesten*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1937), hlm. 4.

Komerling Ulu di Keresidenan Palembang, antara sungai Macak dan Belitang. Tanah-tanahnya meliputi wilayah marga Buay Pemuka Raja, Madang Suku I, Madang Suku II, Semendawai Suku II, Semendawai Suku III, dan Belitang. Pemerintah Belanda menyebutkan bahwa marga Belitang termasuk marga yang paling luas diantara marga-marga lainnya. Rencana ini dibuat oleh Tuan Vissers dengan mempelajari divisi relatif dari Departemen Dalam Negeri dan Komite Kolonisasi.



**Gambar 5:**  
**Pemilihan Koloni Belitang, Dekat Martapura, di Karesidenan Palembang, Sumatra**

Sumber: Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement In the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, hlm. 215.

Kelompok kolonisasi pertama yang dikirimkan pemerintah Belanda tiba di Belitang pada 17 Agustus 1937, dan telah memindahkan keluarga sebanyak 250, untuk mendirikan desa Sidomulyo dan Sidomukti, dekat desa simpang di sudut timur laut selatan. Jumlah koloni yang dipindahkan, terus mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 1938 sebanyak 550 keluarga dipindahkan dan membentuk enam desa baru di sebelah barat pemukiman pertama, dan di bagian selatan, desa-desa itu diberi nama Sidodadi, Trokorejo, Sidoharjo, Wonorejo, Wonosari, dan Karangrejo. Semua desa ini berada di sepanjang jalan mulai dari Tanjung Raya mengarah ke Sukajadi dan ke Muncak Kabau.

Pada tahun 1939 sebanyak 1.506 keluarga, dibagi menjadi dua kelompok untuk membangun desa. Kelompok pertama ditempatkan tepat di selatan desa yang dibangun pada tahun 1938 dan yang lainnya berada di ujung selatan proyek. 1000 keluarga pertama membentuk desa dengan nama Wonotirto, Wonosari, Wonokitri, Wonosigro, Karangtengah, Sidorahayu, Karanglo, Cigabus, dan Karang Kemiri. Kelompok kedua sebanyak 500 keluarga akan membangun desa dengan nama Tanjungsari, Tanjungmas, dan Elingeling.



menerima bantuan. Oleh karena itu, para koloni di Belitang ini diharapkan agar menjadi inti ekspansi lebih lanjut. Dalam program kolonisasi yang diadakan selama tahun 1937 sampai 1941 telah menghabiskan dana komisi sebesar 5.813.006 gulden. Dengan jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan sebanyak 35.572 keluarga.

Pengiriman kolonisasi ke Belitang, melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api dari desa mereka ke Tanjung Priuk, Pelabuhan Batavia, kemudian naik kapal uap ke Oosthaven. Untuk perjalanan selanjutnya yang mengarah ke wilayah penjajahan Belitang dengan menggunakan kereta api Sumatera Selatan ke Martapura di Kecamatan Lampung, dan perjalanan yang terakhir dengan menggunakan bus. Perjalanan para pemukim Jawa ke Sumatra Selatan berlangsung dengan lancar, setiap kali pengiriman akan dikirimkan sebanyak 1.620 jiwa. Emigran diangkut secara teratur sebagai koloni dengan layanan reguler ke pelabuhan timur, transportasi ini mengangkut kolonisasi Lampung dan kolonisasi Belitang, di Palembang. Dari 16 Maret sebanyak 65.000 jiwa telah diangkut ke Lampung tanpa menghitung jumlah yang dihabiskan untuk kolonisasi Belitang.<sup>15</sup>

Keluarga-keluarga yang didatangkan untuk membentuk inti di Belitang dari tahun 1937 sampai 1941, akan ditempatkan di gudang atau bedeng, dengan masing-masing bangunan akan menampung beberapa keluarga, dan diberi waktu sekitar satu bulan untuk membersihkan pekarangan mereka dan membangun rumah sederhana. Pada tahun 1940 keluarga-keluarga yang bermigrasi

---

<sup>15</sup>*De Indische Courant*, Donderdag, 23 Maret 1939, No. 40.

ditempatkan di rumah para pemukim yang lebih tua sampai mereka mempunyai waktu untuk membangun tempat berlindung mereka sendiri, migrasi ini di bawah sistem gotong royong.

Rumah-rumah koloni ini dibangun secara sederhana dengan atapnya yang hanya ditutupi dengan alang-alang dan rerumputan keras lainnya, yang terpenting adalah rumah ini bisa melindungi keluarganya dari terik matahari dan hujan. Rumah-rumah koloni ini terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, bisa disebut dengan gubuk, tempat tinggal ini harus digunakan sampai ladang dibersihkan dan panen pertama telah dipanen.

*Kedua*, rumahnya dibangun agak Jarger yang terdiri dari satu atau dua kamar dan dapur, biasanya pembangunan rumah ini memakan waktu dari dua minggu sampai satu bulan, tergantung pada struktur dan keterampilan serta perawatan pembangunannya. Bangunan ini biasanya akan berfungsi selama beberapa tahun, sampai pemukim memiliki cukup uang untuk membangun rumah yang lebih baik, dengan atap yang terbuat dari sirap kayu,<sup>16</sup> atau ubin. *Ketiga*, rumah ini biasanya sudah seperti rumah yang telah dibangun di Gedongtataan.

Program pemindahan penduduk yang telah diadakan oleh pemerintah Belanda, bertepatan dengan sesudah masa kemerdekaan pada tahun 1947 tidak lagi disebut dengan istilah kolonisasi. Istilah ini kemudian diganti dengan nama transmigrasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena kesalahan penjajah Belanda terhadap penduduk pribumi mengenai kerja paksa atau tanam paksa yang akan terus tersimpan di dalam memori ingatan penduduk, sehingga

---

<sup>16</sup>bahan yang tidak umum digunakan di Jawa dimana kayu langka dan mahal.

pemerintah Indonesia tidak bisa mengakui apa yang telah dicapai selama program kolonisasi, oleh karena itu istilah kolonisasi dihapuskan dan diganti dengan istilah transmigrasi.<sup>17</sup>

Pelaksanaan transmigrasi pada masa Orde Lama dimulai pada bulan Desember 1950 ke Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan transmigrasi pada masa Orde Lama diketuai oleh A. H. D. Tambunan, biaya dalam program ini ditanggung dari pihak Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Pada masa Orde lama pemerintah Indonesia telah berhasil memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang dari tahun 1950-1959.<sup>18</sup>

Pada tahun 1953 pemerintah telah berhasil memindahkan sebanyak 40.000 jiwa yang berhasil ditempatkan di Propinsi Sumatera Selatan, yang tersebar di beberapa wilayahnya, salah satu sarasannya ialah dikirimkan ke wilayah Belitang, pelaksanaan program transmigrasi versi pemerintah Indonesia sama dengan pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda sebelumnya, dari pemberangkatan yang menggunakan kereta api dan dilanjutkan dengan menaiki bus. Setibanya di Belitang mereka kemudian ditempatkan pada penampungan sementara seperti di gudang atau bedeng, yang ada di desa Gumawang dan desa Karang Binangun sebelum akhirnya disebar untuk membuka lahan-lahan baru.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, diterjemahkan oleh Sri Ambar Wahyuni Prayoga, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 11.

<sup>18</sup>Amral M. Syamsu, *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi*, ( Jakarta: Jambatan, 1986), hlm. 327.

<sup>19</sup>Khamdi, masyarakat Transmigrasi pada tahun 1953, umur 80 tahun, Wawancara tanggal 12 Mei 2021.

Selama pelaksanaan program ini setiap keluarga akan mendapatkan jatah berupa kebutuhan pokok yang ditanggung pemerintah selama kurang lebih satu bulan beserta alat-alat perkakas. Kebutuhan pokok terdiri dari beras, garam, minyak, dan bahan makanan yang mengandung protein. Perkakas lainnya seperti kaleng bensin bekas, kaleng kosong lainnya, dan sebotol bir. Alat-alat pertanian seperti cangkul, kapak, parang atau golok, panci masak, dan lampu kecil. Untuk kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga diberi batu asah secara gratis dan dipinjamkan gergaji tangan untuk dua orang. Para transmigran yang dikirimkan akan diberikan tanah seluas dua hektar untuk digarap menjadi ladang dan sawah serta tempat tinggal.

Pada masa transmigrasi Orde Lama dapat dibagi menjadi beberapa kategorisasi transmigrasi, antara lain. (1) transmigrasi umum, sistemnya adalah kehidupan para transmigran selama delapan bulan dan segala bentuk biaya akan ditanggung oleh pemerintah, (2) transmigrasi keluarga, sistemnya yang sangat memberatkan para transmigran, sehingga pelaksanaannya tidak digunakan lagi sejak tahun 1959, (3) transmigrasi biaya sendiri, sistemnya adalah semua biaya akan ditanggung sendiri oleh peserta, tetapi setelah menerima lahan, semua subsidi akan ditanggung oleh pemerintah seperti transmigrasi umum, (4) transmigrasi spontan, sistemnya semua ongkos ditanggung sendiri, sampai keberangkatannya ke lokasi harus diurus sendiri.<sup>20</sup>

Pelaksanaan transmigrasi pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1965, dan telah berhasil memindahkan transmigran sebanyak 182.414 orang atau 52.421

---

<sup>20</sup>Nugraha Setiawan, *Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan (1905-2005)*, hlm. 9.

keluarga. Pada masa Orde Baru dikenal dengan kategori transmigrasi umum dan spontan. Pada transmigrasi spontan semua biaya ditanggung oleh pemerintah, di lokasi dengan memperoleh sebanyak dua hektar lahan, alat-alat pertanian, dan rumah, mencakup pembiayaan yang ditanggung selama 12 bulan pertama untuk membuka tegalan, dan delapan bulan pertama untuk membuka area persawahan.

Pada masa Orde Baru juga dikenal dengan istilah rencana pembangunan lima tahun atau disingkat dengan repelita. Repelita pertama pada tahun 1965-1969 digunakan untuk menciptakan stabilitas nasional, yang bertujuan untuk mencapai swasembada beras dengan meningkatkan produksi sebanyak 50% selama lima tahun. Repelita kedua, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran mulai ditingkatkan. Pembangunan proyek irigasi yang besar dan menjadikan dataran rendah seperti Sumatra dan Kalimantan sebagai daerah lumbung padi.<sup>21</sup>

Pada repelita ketiga dan keempat menjadi "masa target", dan sasarannya yang tidak dapat diganggu lagi. Tujuan dari repelita tiga yakni tahun 1979-1984 telah mengirimkan sebanyak 500.000 kepala keluarga. Di tahun-tahun ini pula pemerintah sudah membagi tugas pada departemen-departemen terkait, seperti departemen PU (Pekerjaan Umum) agar segera mempersiapkan lokasi. Departemen transmigrasi bertugas merekrut, membina, dan memindahkan para transmigran. Departemen pertanian bertugas untuk menyiapkan dan mengurus masalah pertanian, dan departemen agama yang bertugas dalam mengurus dan menyiapkan tempat ibadah.

---

<sup>21</sup>Patrice Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, diterjemahkan oleh Sri Ambar Wahyuni Prayoga, hlm. 12.

Dalam pelaksanaan repelita keempat tahun 1984-1989, program transmigrasi sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Pemerintah telah berhasil memindahkan penduduk sebanyak 750.000 kepala keluarga. Tetapi tetap saja ada permasalahan yang tiba-tiba datang seperti harga minyak turun pada tahun 1986-1987, sehingga selama dua tahun ini anggaran yang telah ditetapkan terpaksa dikurangi sebanyak 75% oleh departemen transmigrasi. Karena kekurangan dana tersebut, maka dengan terpaksa lokasi-lokasi pemukiman yang telah ditetapkan tidak bisa menampung para transmigran dalam batas waktu yang telah direncanakan.

### **C. Pembangunan Bendungan Perjaya dan Perkembangannya**

Seorang koresponden dari Bandung ketika sedang mengadakan survei terhadap kewilayahan, mengatakan bahwa dia telah menemukan objek lahan yang sangat besar dan luas, objek ini mampu digunakan untuk membangun hampir sekitar 30 ribu bangunan, dengan perkiraan awal yang akan menelan biaya sekitar sembilan ton, dengan jumlah tersebut yang didapat dari dana karet, cukup besar dan bisa memuat banyak keluarga tani Jawa yang ingin bermigrasi ke tanah sabrang. Objek ini berada di Belitang yang terletak disudut terpencil di Keresidenan Palembang perbatasan Lampung.<sup>22</sup>

Pada tahun 1938, kolonisasi di Belitang meluas setiap tahunnya, ribuan keluarga akan datang dari Jawa untuk menempati wilayah ini. Pada saat itu seorang ilmuwan tanah yang dibawa oleh pemerintah Belanda saat mengunjungi marga Belitang menyatakan bahwa secara fisik, kandungan tanah liat yang ada di

---

<sup>22</sup>*De Locomotif Eerste Blad*, Semarang, Dinsdag, 16 Maret 1937, No. 26.

wilayah ini sangat cocok untuk budidaya sawah, meskipun minim akan kandungan mineral yang penting untuk pertumbuhan tanaman padi dan tanaman lainnya, Tetapi analisisnya mengenai endapan lumpur yang terbawa sungai Batanghari Komerling, bahwa air untuk irigasi yang diambil dari sungai tersebut akan menambah bahan yang kaya ke lahan pertanian.<sup>23</sup>

Pada awalnya, sebelum dilakukan pembangunan sistem irigasi untuk wilayah Belitang, terlebih dahulu akan dilakukan dengan membangun jalan-jalan terkait yang nantinya digunakan untuk perjalanan para koloni Jawa yang akan dipindahkan dan untuk jalan pengangkut alat berat yang nantinya akan digunakan untuk membangun saluran irigasi itu. Pembangunan jalan terkait yang akan dilaksanakan berada di bawah naungan Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Tata Air.<sup>24</sup>

Sebelum pekerjaan pembangunan irigasi selesai, koloni harus sudah diberangkatkan, karena ladang akan tersedia setelah adanya penebangan. Pada tahun 1940, kiranya diharapkan seluruh medan yang dapat menampung sekitar 100.000 orang akan selesai dibangun.<sup>25</sup> Pada pembukaan ladang atau tegalan selanjutnya akan ditanami beberapa tanaman yang hasilnya sangat baik dan seringkali melebihi apa yang diharapkan. Para koloni akan menerima sebanyak empat tanah dan salah satu tanahnya akan digunakan untuk berladang.<sup>26</sup>

Setelah selesai pengerjaan pembangunan jalan terkait, maka selanjutnya para insinyur irigasi yang ditugaskan akan mulai membangun saluran utama

---

<sup>23</sup>Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement In the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, hlm. 215.

<sup>24</sup>*Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlands-Indie*, Maandag, 22 Januari 1940, hlm. 1.

<sup>25</sup>*De Locomotiefvaan*, Dinsdag, 18 Agustus 1936, No. 192.

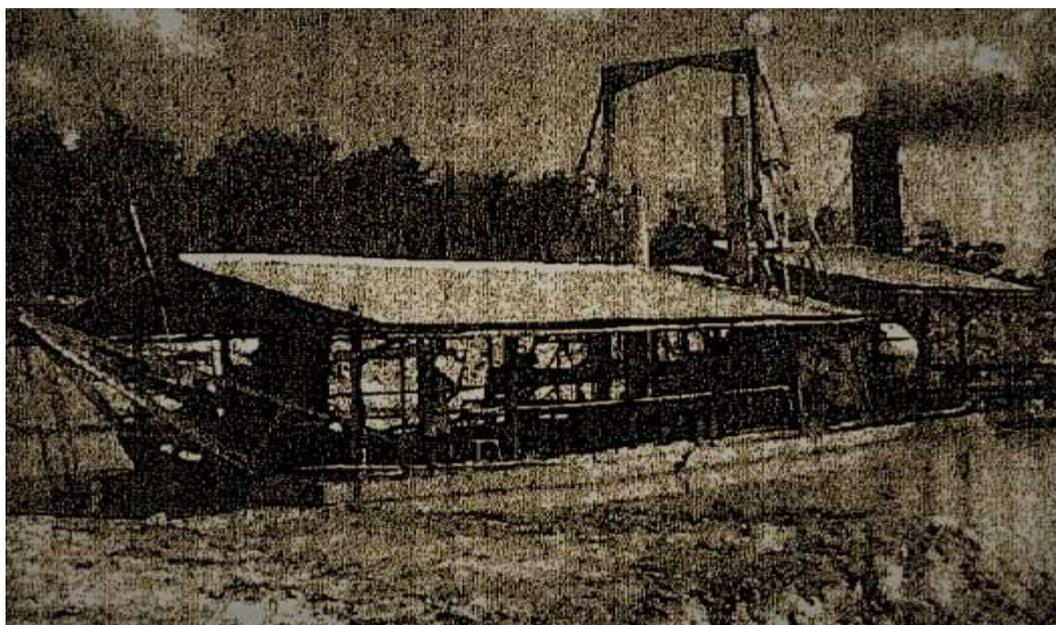
<sup>26</sup>*Deli Courant*, Dinsdag, 30 Oktober 1939, hlm. 23.

sepanjang 40 kilometer yang nantinya digunakan untuk memasok sekitar 19.000 hektar sawah. Saluran masuknya terletak di Kurungan Nyawa, pembangunan utama digali oleh tiga kontraktor berbeda, untuk 12 kilometer pertama dibuat oleh kontraktor dari *Hollandsche Beton Maatschappij*, untuk pembangunan kedua sejauh 20 kilometer dibuat oleh kontraktor dari *Volker Aannemings Maatschappij*, dan yang ketiga berasal dari kontraktor Cina dan pekerjanya adalah buruh Cina, bertugas menggali sisanya sejauh delapan kilometer.

*Hollandsche Beton Maatschappij* menggunakan kapal keruk apung yang ditempatkan di atas kapal beton buatan lokal. Bagian pertama dari proyek irigasi ditargetkan akan selesai pada tanggal 1 Oktober 1941, yaitu empat tahun setelah kedatangan para pemukim pertama, dan sisanya akan diselesaikan pada tanggal 1 Oktober 1943. Total biaya diperkirakan mencapai 2.150.000 gulden, dengan 50.000 nya berasal dari dana pajak ekspor karet khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement In the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, hlm. 216.



**Gambar 7:**

**Kapal Keruk Apung Menggali Saluran Irigasi Utama, Lambungnya Terbuat dari Semen, Koloni Belitang, Karesidenan Palembang, Sumatera**

Sumber: Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement In the Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, hlm. 181.

Irigasi yang dibangun ini dinamakan dengan Bendungan Komerling, dan bertujuan untuk mengairi seluruh wilayah koloni Belitang secara intensif, dengan memanfaatkan perairan Sungai Komerling sebagai sumber air utamanya. Setelah proyek pembangunan selesai dan implementasinya akan berlangsung secara bertahap seiring dengan peningkatan populasi pemukim. Beberapa tahun kemudian, setiap bagian wilayah Belitang yang ditebang dan diisi oleh para petani, akan menjadi sebuah tegalan terlebih dahulu, lalu sedikit demi sedikit mulai dibentuk seperti area persawahan dengan batas-batas jalan atau galengan baru, selanjutnya akan diberi air dari pipa utama untuk mengairi sawah baru tersebut.



**Gambar 8:**  
**Proses Pembuatan Saluran Irigasi Belintang atau Bendungan Komerling tahun 1938**

Sumber: Kantor Dinas Kearsipan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur

Jika nantinya daerah tersebut sudah mulai digarap dengan bantuan air yang cukup, maka pemeliharaan ternak juga akan dilakukan terutama untuk ternak bajak, hal ini akan sangat membantu dalam mengolah sawah. Di samping itu, kotoran ternak juga mampu menjadi pupuk organik dalam pertanian intensif.<sup>28</sup> Cara yang dilakukan oleh orang-orang Jawa seperti ini dalam menggarap tanahnya telah menimbulkan respon positif dari penduduk asli di daerah sekitarnya. Hal ini antara lain terlihat dari kenyataan bahwa penduduk asli tidak hanya membeli hasil pertanian orang-orang Jawa, tetapi juga sering memanggil mereka untuk membantu dalam persiapan lahan sawahnya secara intensif.

---

<sup>28</sup>*Deli Courant*, Dinsdag, 30 Oktober 1939, hlm. 23.

Pada awal-awal pembangunan Bendungan ini belum bisa mengairi area persawahan secara maksimal karena bentuk bangunannya masih berbentuk sederhana, bahan yang digunakan untuk membendung dari muara sungai Komerling hanyalah dibuat dari karung-karung berisi tanah yang ditumpuk-tumpuk dan tengahnya dibentuk seperti gorong-gorong. Sehingga saat itu sebagian besar masyarakat, dalam mengatasi masalah pengairan pada pertanian masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air utamanya. Keadaan ini terus berlanjut sampai pasca kemerdekaan. Pembangunan Bendungan modern baru dilakukan pada masa Orde Baru yang dipusatkan di Desa Perjaya Kecamatan Martapura sekarang dan dinamai dengan Bendungan Perjaya. Bendungan ini dibangun untuk memaksimalkan ketersediaan air yang sebelumnya kurang maksimal di Kurungan Nyawa.<sup>29</sup>

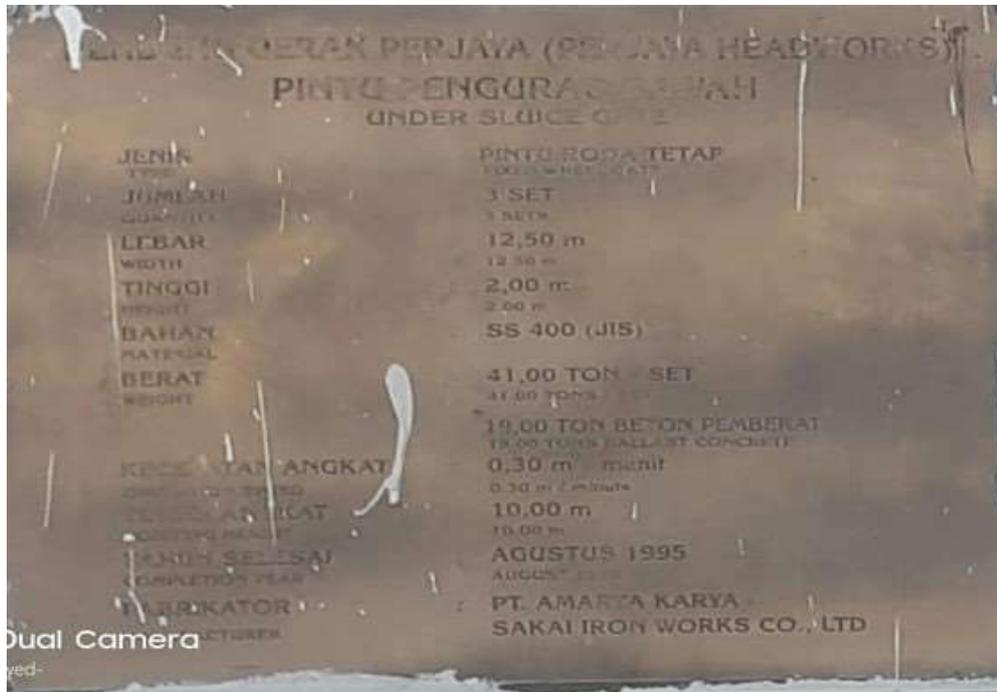
Pengerjaan pembangunan Bendungan Perjaya dilaksanakan selama empat tahun dimulai dari tahun 1991 sampai 1995, pada tahun 1996 sudah mulai mengirim air ke Belitang. Tujuan dari Bendungan Perjaya ini adalah untuk meningkatkan daerah irigasi di Belitang dengan jumlah total keseluruhan seluas 120.000 Hektar, pada tahun 1994 mulai dioperasikan untuk melayani jaringan sekunder Belitang seluas kurang lebih 20.968 Hektar. Studi kelayakan pembangunan pada Bendungan dilakukan oleh JICA pada tahun 1981<sup>30</sup> dengan pemilihan yang berdasarkan pada pertimbangan teknik dan ekonomi, dimana

---

<sup>29</sup>Supriyadi, Pelaksana Teknik OPSDA II Bendung Gerak Perjaya, umur 52 tahun, *Wawancara* Tanggal 21 Mei 2021.

<sup>30</sup>Sohei Matsuno dan Oktarina, "Studi Kelayakan Terhadap Proyek Lembah Sungai Musi Banyuasin bagian 1: Studi Umum Sedimentasi", *CV. Maxikom Palembang: Jurnal Keteknik Pertanian*, vol. 21., No. 3, 2007, hlm. 267.

sistem tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan Bendung tetap atau Bendung kombinasi.



**Gambar 9:**  
**Prasasti Tahun Selesai Pembangunan Bendung Gerak Perjaya**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, [10 Januari 2021]

Pada pelaksanaan kontruksi dan perbaikan dilakukan oleh tiga Perusahaan, (1) Pelaksana Pekerjaan Sipil dari PT. Pembangunan Perumahan konsultan dari Nipon Paint, (2) Pelaksana Pekerjaan Pintu air dari PT. Amarta Karya-Sakai Jepang, dan (3) Perbaikan Pintu-Pintu dan Sistem Kontrol dari PT. Waskita Karya. Kontruksi Bendung terdiri dari bangunan utama dan bangunan pelengkap. *Pertama*, Bangunan utama terdiri dari pelimpah banjir, pembilas, tangga ikan, jembatan pelayanan dan kolam olakan, pada bangunan pengambilan dilengkapi dengan kantong lumpur. *Kedua*, Bangunan pelengkap terdiri dari rumah kontrol

yang memiliki ruang kerja empat lantai dengan luas 638 m<sup>2</sup>, dan rumah generator yang dilengkapi dengan genset untuk operasi pintu memiliki luas 168 m<sup>2</sup>.<sup>31</sup>



**Gambar 10:**  
**Bendung Gerak Perjaya**

Sumber: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pusat di Kecamatan Martapura

Setelah masa pembangunan Bendungan Perjaya, ketersediaan air untuk pertanian wilayah Belitang sangat berlimpah-limpah karena Bendungan ini dibuat dengan menggunakan sistem hidrolik canggih sehingga mampu menyediakan air secara maksimal. Pembangunan Bendungan besar yang ada di Belitang tidak terlepas dari pengalaman masyarakat di pulau Jawa mengenai tata cara pemaksimalan potensi lahan yang kurang subur dengan cara dialiri air ke lahan tersebut melalui sistem irigasi. Sebelum menjadi lahan pertanian yang bagus seperti sekarang, Belitang dulunya merupakan daerah yang dipenuhi dengan pohon-pohon layaknya sebuah hutan dengan berbagai binatang buas di dalamnya, seperti gajah, babi hutan, rusa, monyet, tikus, ular, dan hewan lain yang

---

<sup>31</sup>Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air II, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Bagian Pelaksana Kegiatan O&P Sumber Daya Air II.

berbahaya. Kemudian setelah adanya pengiriman Para kolonisasi ke Belitang untuk membuka lahan-lahan pemukiman dan area pertanian disertai dengan sistem irigasi yang memadai, kemudian berdampak pada sistem perekonomian wilayah maka jadilah wilayah Belitang seperti saat ini.